





















dai pidato, tetapi tidak alim; tidak pandai nahwu shorof."<sup>16</sup> Demikian olokan teman-temannya. Pengalaman semacam ini mendorong Hamka untuk memperdalam ilmu agama dan khususnya bahasa Arab ke tanah Arab.

Tak lama, setelah pulang dari Mekkah, ia sudah dipanggil ke mana-mana untuk bertabligh. Bagi Hamka, kemampuan pidato merupakan salah satu alat mewujudkan cita-citanya "Bergerak untuk kebangkitan kembali umat Islam" sebagai yang diperjuangkan ayahnya, seperti yang diajarkan iparnya, A.R Sutan Mansur; dan semangat Islam Merdeka yang diterimanya dari Cokroaminoto serta kobaran semangat dari surat-surat kabar Mesir dan lain lain.<sup>17</sup>

Kian hari nama Hamka semakin melambung setelah pidatonya yang mempesona dan menitikkan air mata hadirin pada Kongres Muhammadiyah XX di Yogyakarta pada 1931, yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi muballigh di Makassar.<sup>18</sup>

Sebagai seorang muballigh dan guru di berbagai daerah dan pulau, telah mencuatkan namanya menjadi tokoh dan ulama tingkat nasional yang cukup disegani, ter lebih setelah ia menetap di Jakarta dan mendirikan masjid Agung Al Azhar.

16. Hamka, Kenang-Kenangan Hidup I, hal. 106

17. Hamka, Kenang-Kenangan Hidup II, hal. 20

18. Ibid, hal. 26













Kalau Muhammadiyah diibaratkan samudera, maka cukup jauh sudah Hamka berenang di dalamnya, dan tentu, pukulan ombak dan gempuran badai pun datang silih berganti. Ia menjadi sadar bahwa mengurus dan memimpin organisasi besar semacam Muhammadiyah tidaklah semudah membalik telapak tangan, apalagi, nafas Muhammadiyah adalah nafas pembaharuan, di saat mana masyarakat masih kuat dikungkung adat dan tradisi yang bertentangan dengan Islam, seperti, bid'ah, tahayyul dan khurafat. Itulah sebabnya, Hamka masih tetap berkuat semakin kuat dalam organisasi Muhammadiyah sebagai ajang dan sarana dalam membongkar akar-akar sinkretisme menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Karena didasari semangat pembaharuan itulah, Hamka semakin giat dalam pergerakan Muhammadiyah, dengan mengikuti berbagai kongres di berbagai daerah dan bila perlu ikut terjun langsung menangani kader-kader Muhammadiyah yang ada di berbagai pelosok tanah air. Berbagai jabatan pun pernah ia pegang, mulai dari Pimpinan Cabang, menjadi Anggota Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah, pada 1946 dipilih Konferensi Muhammadiyah Sumatera Barat menjadi Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sumatera Barat, pada 1953, saat Kongres Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto, ia dipilih menjadi Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jabatan ini ia pegang terus menerus sampai pada









gai yang dengan ketajaman penanya menuangkan pemikiran-pemikiran konstruktif. Jika melihat kenyataan ini, rasanya terlalu sulit pula untuk menyatakan bahwa Hamka tidak berpolitik. Sebab, ajaran Islam yang merupakan materi pokok pelaksanaan dakwah, merupakan ajaran yang mengandung nilai universal dan semesta, di mana di dalamnya tercakup semua masalah tentang berbagai aspek kehidupan. Islam tidak sekedar mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yang bersifat ritual saja, tetapi juga mengatur tata kehidupan masyarakat secara luas dengan segala seginya, seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain.

Dengan demikian, setiap juru dakwah, teristimewa yang berpredikat ulama, seperti halnya Hamka, diucapkan atau tidak, secara tersirat jelas berpolitik. Sama halnya seseorang yang diam seribu bahasa, bukan berarti tidak mempunyai sikap. Sebab "diam" itu sendiri sudah merupakan sikap.

Sebagaimana diketahui bahwa masa muda Hamka adalah masa penuh gejolak revolusi, yang menyebabkan struktur dan sistem sosial politik masyarakat Indonesia sedang mengalami transisi dan perubahan. Perubahan-perubahan sosio-politik dan kultural yang berlangsung sekitar 1944-1949 di Indonesia memaksa setiap potensi yang ada dalam masyarakat termobilisasikan untuk mencapai tujuan





Sejak itulah Hamka kembali terlibat dalam persoalan politik. Sebagai orang politik, Hamka aktif dalam perjuangan fisik, dalam perundingan-perundingan, termasuk dengan Hatta, wakil Presiden<sup>38</sup> dan Soekarno sebagai Presiden

Sebagai akibat dari Agresi Belanda yang pertama - pada bulan Juli 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan "cease fire". Selanjutnya, membentuk Komisi Tiga Negara (KTN), terdiri dari Australia, Amerika Serikat dan Belgia. Awal September 1947, konsul-konsul dari Australia, Belgia dan Inggris (mewakili Amerika) datang ke Bukittinggi sebagai kota pusat perjuangan untuk Sumatera' dimana Bung Hatta sebagai wakil Presiden berkedudukan untuk menyaksikan secara langsung hasrat rakyat Indonesia untuk merdeka. Pada kesempatan itu, Sebagai pimpinan FPN (Front Pertahanan Negara), Hamka dengan berapi-api berpidato menyampaikan hasrat rakyat untuk merdeka dan bertekad mempertahankannya walaupun dengan bambu runcing.<sup>39</sup>

Perintah "cease fire" dari PBB, akhirnya dipatuhi kedua belah pihak, namun tak lama, karena Belanda mengkhianatinya dengan agresi militernya yang kedua di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selama dua hari berturut-turut Bukittinggi di bom oleh Belanda dan Padang Panjang

---

38. Moh. Hatta, Hamka 70 Tahun, dalam "Kenang- Kenangan 70 Tahun Buya Hamka, hal. 4

39. Amara, Jangan Buya Hamka Dalam Berbagai Peristiwa, dalam "Kenang- Kenangan 70 Tahun Buya Hamka, hal. 314

pun telah didudukinya. Pemerintah Sumatera Barat, 21 De  
seMBER 1948, terpaksa mundur ke Payakumbuh. Maka, perang  
gerilya pun berkecamuk di seluruh pelosok tanah air. Un  
tuk menyatakan kepada dunia bahwa Pemerintahan Indonesia  
belum menyerah dan masih ada - saat itu Soekarno telah  
ditangkap Belanda - maka tanggal 22 Desember 1948, jam  
4 pagi, di Halaban, 16 Km selatan Payakumbuh, berdirilah  
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan -  
presidennya, Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Sementara itu,  
Hamka atas nama Pemerintahan Militer Sumatera Barat berke  
liling Sumatera Barat, untuk memberi penerangan dan khut  
bah-khutbah di berbagai tempat, dan karena Hamka telah cu  
kup dikenal rakyat Sumatera Barat, maka masyarakat sangat  
menghargai usaha-usaha Hamka tersebut.<sup>40</sup>

Karena tak mampu menghadapi kaum gerilya, pihak Be-  
landa terpaksa menyerahkan kedaulatannya kepada Pemerintah  
Republik Indonesia.

Ketika Hamka pindah ke Jakarta pada bulan Januari  
1950, aktivitas-aktivitas politiknya cenderung menurun.-  
Seperti yang telah dikemukakan dahulu, dia bukanlah seo-  
rang ahli politik. Dia adalah ulama dan pujangga, karena  
itu, gerakan sosial (di Muhammadiyah) dan kegiatan dak-  
wah serta karang mengarang tak pernah henti, tetap ber -

---

40. Mr. S.M. Rasjid, Kenang-Kenangan Bekerja Sama  
dengan Hamka, dalam "Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka,  
hal. 25-26





dan Masyumi inilah yang terus mendorongnya ke dalam arena politik. Ia menjadi anggota DPR sebagai wakil dari Jawa Tengah pada Pemilu pertama tahun 1955.<sup>43</sup>

Pada waktu itu, Soekarno mulai memekarkan kekuasaannya. Sementara PKI bangkit kembali sebagai kekuatan politik yang cukup signifikan. Hamka bersama Natsir termasuk orang yang menentang ide Soekarno tentang "Demokrasi Terpimpin". Penentangan ini menyebabkan ia berada di bawah bayang-bayang ancaman Soekarno, tergilas revolusi.<sup>44</sup> ✓

Hamka, Natsir dan bahkan Masyumi serta partai-partai politik yang menentanginya memang kemudian tergilas-revolusi. Soekarno, pada tahun 1959 mengeluarkan Dekrit Pembubaran Konstituante dan pada tahun 1960 membubarkan Masyumi.<sup>45</sup> Peristiwa-peristiwa semacam ini mempunyai implikasi besar dalam kehidupannya, justru setelah ia melepaskan diri dari politik praktis.

Konsentrasi kegiatannya kemudian ditumpahkan ditumpahkan dalam bidang dakwah Islamiyah. Dalam hal ini Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru terbuka bagi Hamka. Secara perlahan ia memulai membangun suasana keagamaan -

---

43. Bajasut, Alam Fikiran dan Djedjak Perdjjuangan Prawoto Mangkusamito, Documenta, Surabaya, 1972, hal.435

44. M. Natsir, Dua Kali Kami Berjumpa, dalam "Kejang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka, hal. 10

45. Sartono Kartodirdjo, et.al, Sejarah Nasional-Nasional, Jilid VI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 1975, hal. 258





jalalah itu serta pusat kegiatan-kegiatan dakwah, maka dengan sendirinya Hamka dan Masjid tersebut menjadi pusat oposisi ideologis. Sebab, seperti kata Rosihan Anwar, kedudukan Umat Islam sangat terdesak. PKI sedang mendapatkan angin dan mereka tidak mengabaikan kesempatan buat mengucilkan golongan Islam dari gelanggang politik. Dalam keadaan demikianlah, "Gema Islam" berusaha memanggil umat Islam untuk merapatkan barisan.<sup>51</sup>

Merapatkan barisan umat Islam inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh elite ABRI dalam menghadapi PKI. Akibatnya cukup terasa. Masjid itu diamati intelijen Orde lama, dan koran PKI menuduh tumbuhnya "Neo-Masyumi" yang dipimpin oleh Hamka.<sup>52</sup> Perkembangan-perkembangan ini bagi Hamka pribadi, semakin tidak menyenangkan. Sejak itu, selama berbulan-bulan Hamka menjadi sasaran pers PKI. Ia dituduh plagiat dalam hubungannya dengan buku "Tenggelamnya Kapal Van der Wijck".<sup>53</sup> Puncak dari semua itu, Hamka dipenjarakan Sukarno. Ia dituduh mengadakan -komplotan hendak membunuh Bung Karno.<sup>54</sup> Di penjara itu karya terbesarnya "Tafsir Al Azhar" lahir dari tangannya.

---

51. Rosihan Anwar, Hamka, "Gema Islam" dan Kumpulan Da'wah, dalam "Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka", hal. 249

52. Rusydi, Opcit, hal. 170

53. Ibid, hal. 170

54. Ibid, hal. 239









